Journal
Peqguruang: Conference Series
eISSN: 2686–3472

JPCS
Vol. 2 No. 2 Nov. 2020

Graphical abstract

PENGUATAN PERAN KELEMBAGAAN BKKBN PADA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DI UPT-DPPKB KECAMATAN ULUMANDA KABUPATEN MAJENE

[1]Murniada, [2]Rustan IR, [3]Sri Yuyun
Program Studi Ilmu pemerintahan Universitas Al Asyariah Mandar.

*Corresponding author
[1]unhykagung@gmail.com, [2]rustam.irta17@gmail.com
[3]Yuyunsri765@gmail.com

Abstract

The study uses descriptive Kualitative methods. The subjects of this study were the Population Section Head of Ulumanda Subdistrict, Head of UPT-DPPKB, Society of Kotrasepsi users, PPKB Officers and Non-KB Community Sub-PPKBD.
The focus of this research was how KB staff at UPT Ulumanda District as an institution could provide an understanding of citizens community in Ulumanda District through family planning counseling on the importance of using contraception in managing birth spacing.
The results showed that the implementation of these tasks and functions was not simple given the role of the BKKBN which was very technical and included a national locus. The above role becomes an umbrella for the implementation of administrative and management support for all BKKBN organizations to the field level. Thus the scope of coordination carried out not only at the level of the Ministry and institutions but also with the Province and District/City. Without the ability to manage coordination in harmony between the center and the regions, it is undoubtedly difficult to carry out the Secretariat's duties and functions smoothly.

Keywords: *strengthening, institutional, population control*

Abstrak

Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif Subyek penelitian ini adalah Kasi Kependudukan Kec.Ulumanda, Kepala UPT-DPPKB, Masyarakat pengguna alat Kotrasepsi, Petugas PPKB dan Sub PPKBD Masyarakat non KB.
Fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana petugas KB di UPT Kecamatan Ulumanda secara kelembagaan dalam peranannya mampu memberikan pemahaman terhadap warga masyarakat di Kecamatan Ulumanda melalui Penyuluhan KB tentang pentingnya menggunakan alat kontrasepsi dalam mengatur jarak kelahiran.
Hasil penelitian menunjukan bahwa Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut tidak sederhana mengingat peran BKKBN yang sangat teknis dan mencakup lokus nasional. Peran di atas menjadi payung bagi pelaksanaan dukungan administrasi dan manajemen segenap organisasi BKKBN hingga ke tingkat lapangan. Dengan demikian lingkup koordinasi yang dilakukan tidak hanya di level Kementerian dan lembaga tetapi juga dengan Provinsi dan Kab/Kota. Tanpa kemampuan mengelola koordinasi secara selaras baik antar pusat dan daerah maka niscaya sulit untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kesekretariatan secara lancar.

Kata Kunci: *penguatan, kelembagaan, pengendalian penduduk*

Article history
DOI: http://dx.doi.org/10.35329/jp.v2i2.1583
Received : *09 September 2020* | **Received in revised form :** *19 September 2020* | **Accepted :** *05 Oktober 2020*

1. PENDAHULUAN

Keluarga Berencana selama beberapa waktu lalu telah terbukti mampu menjadi salah satu jalan keluar strategis dalam pembangunan nasional. Hal ini telah melahirkan semangat untuk merevitalisasi kembali Keluarga Berencana dan menempatkannya sebagai prioritas dalam perencanaan pembangunan dalam satu dasawarsa terakhir

Badan Kesejahteraan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sesuai dengan tugas pokoknya untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan Keluarga Berencana memiliki peran vital untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk secara signifikan melalui program-program pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana. Pada kenyataannya upaya tersebut seringkali dihadapi dengan hambatan kelembagaan baik internal organisasi, antar sektor maupun secara vertikal antara pusat dan daerah. Hal ini menyebabkan tidak efektif dan efisiennya pelaksanaan program di lapangan. Sejalan dengan semangat revolusi mental, hal ini harus dapat diatasi segera dan menjadi tantangan untuk mewujudkan pengendalian penduduk secara signifikan.

Tujuan penelitian ini, untuk memberikan gambaran urgensi penguatan peran kelembagaan BKKBN kedepan khususnya dalam dukungan manajemen demi mewujudkan tujuan-tujuan Pembangunan Nasional yang telah ditetapkan.

Salah satu pihak yang dapat mendorong keberhasilan suatu program KB di masyarakat adalah Petugas Lapangan Keluarga Berencana. Keberhasilan program keluarga berencana dititik beratkan pada peran dan fungsi Petugas Lapangan Keluarga Berencana dalam meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam program KB.

Menurut Zuhriyah, L. (2012) PLKB atau PKB merupakan pegawai negeri sipil atau non pegawai negeri sipil yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan KB. Tugas dan fungsi dasar PLKB/PKB meliputi sepuluh langkah, yaitu pendekatan tokoh formal, pendataan dan pemetaan, pendekatan tokoh informal, pembentukan kesepakatan, penegasan kesepakatan, penerangan dan motivasi, peneladanan atau pembentukan grup pelopor, pelayanan KB-KS, pembinaan peserta, pencatatan, pelaporan dan evaluasi

Menurut Mayasari, Y. (2017) PLKB/PKB adalah Pegawai Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten/ Kota berkedudukan di Desa/ Kelurahan yang bertugas melaksanakan/ mengelola, menggerakkan, memberdayakan serta menggalang dan mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan program KB bersama institusi masyarakat pedesaan/ perkotaan ditingkatan Desa/ Kelurahan.

Secara umum tujuan PLKB menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (2007:3) adalah: Meningkatkan dan memantapkan peran petugas untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam mengelola Program Keluarga Berencana melalui mekanisme operasional dan berbagai jenis pencatatan pelaporan Progam Keluarga Berencana yang berada pada lini lapangan.

Menurut Mahardika (2012:89) menyatakan, bahwa PLKB/PKB adalah Pegawai Pemerintah Daerah (Pemda) Kab/Kota berkedudukan di Desa/Kelurahan yang bertugas melaksanakan atau mengelola, menggerakkan, memberdayakan serta menggalang dan mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan program kependudukandan KB bersama institusi masyarakat pedesaan atau perkotaan ditingkat Desa/Kelurahan. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut di atas, bahwa untuk mencapai tujuan pelaksanaan program keluarga berencana diperlukan petugas lapangan yang dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang tujuan dan manfaat dari kebijakan program keluarga berencana. Keluarga dengan jumlah anak yang tidak banyak serta jarak kelahiran yang ideal tentu diharapkan keluarga mampu menciptakan manusia-manusia yang berkualitas. Usia ideal untuk perkawinan yang diharapkan dilakukan oleh masyarakat bertujuan agar masyarakat mempunyai cukup kesadaran dan kesiapan yang matang dalam perilakunya sehingga akan mampu pula berpikir secara tepat mengenai masa depan keluarga yang dibangun, meliputi jumlah anak dan jarak kelahiran yang ideal.

Selanjutnya mengenai pelaksanaan program dikemukakan oleh Farida (2008:9), bahwa: "Pelaksanaan program merupakan segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh." Lebih lengkap lagi, Hasibuan (2006: 72) juga mengungkapkan bahwa pelaksanaan program adalah suatu pelaksanaan jenis rencana yang jelas dan konkret karena di dalamnya sudah tercantum sasaran, kebijaksanaan, prosedur, anggaran, dan waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan.

Definisi Peran adalah pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan kedudukannya. Peran menentukan apa yang harus diperbuat seseorang bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya. Peran mengatur perilaku seseorang. Peranan menyebabkan seseorang dengan batasbatas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya.

Menurut Mifta Thoha (2002), peran adalah serangkaian perilaku seseorang yang dilakukan berdasarkan dengan karakternya. Kondisi ini bisa dilatarbelakangi oleh psikologi seseorang setiap melakukan tindakan yang diinginakan, sesuai kata hatinya.

2. METODE PENELITIAN

Pada setiap penelitian memerlukan jenis penelitian yang sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti, agar data yang diperoleh menjadi selaras dengan permasalahan sehingga mempermudah pelaksanaan penelitian. Penelitian ini merupakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini juga bertujuan untuk

mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang menggambarkan gejala yang ada (Kriyantono, 2008:69). Dasar penelitian yang digunakan adalah analisis sumber atau studi komunikator. Di mana riset komunikasi ni merupakan studi mengenai komunikator sebagai individu maupun institusi. Peran Kelembagaan BKKBN di Bidang Pengendalian Penduduk Di UPT-DPPKB Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene. Sebagai hasilnya, akan diperoleh pemahaman yang mendalam tentang mengapa sesuatu terjadi dan dapat menjadi dasar bagi riset selanjutnya.

Jenis penelitian Ini Merupakan Penelitian Kualitatif deskriptif. Terdapat tiga hal yang dilakukan pada penelitian ini yakni pengumpulan data, analisis data dan hasil Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif .Bentuk yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yakni prosedur yang menganalisis data yang telah diperoleh dengan menggunakan teori penguatan peran kelembagaan BKKBN.

Jenis dan Sumber data Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder dengan rincian sebagai berikut:

1. Data primer diperoleh dari responden melalui wawancara dengan menggunakan alat bantu dokumentasi dan observasi (pengamatan langsung) di lapangan.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber laporan tertulis yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu data lokasi penelitian yang meliputi kondisi geografis, keadaan penduduk, dan aspek-aspek lain yang menyangkut kondisi dan wilayah penelitian.

a. Pemilihan Informan

Dalam penelitian ini pihak yang akan dijadikan informan adalah yang dianggap dapat memberikan informasi akurat yang dibutuhkan di lokasi penelitian. Cara yang digunakan untuk menentukan informan tersebut adalah purposive sampling yakni teknik sampling yang digunakan oleh peneliti jika peneliti melakukan penunjukan sampel secara sengaja dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam pengambilan sampelnya. (Sugioyono, 2014). Adapun informan dalam penelitian ini adalah 20 orang adalah sbb :

1. Kasi Kependudukan Kec.Ulumanda 1 orang
2. Kepala UPT-DPPKB 1 orang
3. Masyarakat pengguna alat Kotrasepsi 8 orang
4. Petugas PPKB dan Sub PPKBD 5orang
5. Masyarakat non KB 3orang
6. Tokoh Agama 2 orang

b. Teknik Pengumpulan Data

Hasil dan Data yang telah diperoleh dari informan dikumpulkan dan kemudian disajikan dalam tabulasi kemudian direduksi berdasarkan analisa berdasarkan referensi dan teori-teori terkait dengan pembahasan dan selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan

c. Teknik Analisis Data

Teknik analis data yang dilakukan pada penelitian ini berupa; pertama Reduksi Data, kedua display data, dan verifikasi data.

Teknik yang pertama dilakukan adalah menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mentransformassikan data mentah yang diterima oleh informan. Analisis dilakukan secara tajam, ringkas, terfokusmembuang data yang tidak penting dan mengorganisasikan data sebagai cara untuk menggambarkan dan memverifikasi kesimpulan akhir . kaitan dengan penelitian ini adalah reduksi data untuk menyelesaikan data.

Teknik yang kedua yakni merangkaikan sebagai upaya menggambarkan kesimpulan dan mengambil tindakan yang menampilkan data kualitatif dalam bentuk teks narasi. Teknik terahir yakni upaya penarikan kesimpulan yang dapat dilakukan selama penelitian berlangsung.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Keadaan Geografis

Berdasarkan posisi geografisnya, Kecamatan Ulumanda berbatasan langsung dengan :

a. Sebelah Utara Kecamatan Malunda,
b. Sebelah Selatan Kecamatan Tubo Sendana dan Kecamatan Tammerodo
c. Sebelah Timur Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Polewali Mandar, dan
d. Sebelah Barat Selat Makassar

Kecamatan Ulumanda terdiri dari 8 desa yaitu:

1. Desa Sambabo,
2. Desa Salutambung,
3. Desa Kabiraan,
4. Desa Sulai,
5. Desa Tandeallo,
6. Desa Panggalo
7. Desa Ulumanda, dan
8. Desa Popenga.

Desa/Kelurahan tepi Laut adalah desa/kelurahan yang sebagian atau seluruh wilayahnya bersinggungan langsung dengan laut, baik berupa pantai maupun tebing karang Desa/Kelurahan bukan tepi laut adalah desa/kelurahan yang wilayahnya tidak bersinggungan langsung dengan laut.

Kecamatan Ulumanda merupakan salah satu dari 8 Kecamatan yang ada di Kabupaten Majene. Luas wilayah Kecamatan Ulumanda tercatat 456 km2 atau sekitar 48 persen dari total luas Kabupaten Majene, Secara geografis, di Kecamatan Ulumanda banyak dijumpai aliran sungai dan pegunungan.Tercatat ada sekitar 26 sungai yang mengaliri wilayah Kecamatan Ulumanda atau sekitar 30 persen sungai yang ada di Kabupaten Majene dan sekitar 6 pegunungan yang membentang di wilayah ini. Desa Popenga merupakan d sa terluas di Kecamatan Ulumanda dengan luas 126.69 km2 atau sekitar 28 persen luas kecamatan. Sedangkan desa terkecil adalah Desa Sulai dengan luas hanya 12.52 km2 atau sekitar 3 persen luas kecamatan Ulumanda.

2. Letak dan Klasifikasi Desa

Tabel 1: Letak dan Klasifikasi Desa di Kecamatan Ulumanda, 2018

No	Desa/Kel.	Tepi Laut	Bkn tepi laut	Swadaya	Swakarya	Swasembada
1	Sambabo		V	-	-	-
2	Salutambung	v		-	-	-
3	Kabiraan		V	-	-	-
4	Sulai	v		-	-	-
5	Tandeallo		V	-	-	-
6	Panggalo		V	-	-	-
7	Ulumanda		V	-	-	-
8	Polenga		V	-	-	-
Jumlah		2	6	0	0	0

Sumber/ Source: Kantor Camat Ulumanda/ District Office of Ulumanda 2019

Tabel 2: Luas Desa, Jarak (Km) dan Ketinggian Dari Permukaan Air

Desa / Kel.	Luas (km^2)	Jarak Km		Ketinggian dari permukaan Laut
		Kota Kec.	Kota Kab.	
Sambabo	20,88	8	80	23
Salutambung	36,26	10	77	2
Kabiraan	25,62	0	87	30
Sulai	12,52	9	79	7
Tandeallo	58,89	20	107	120
Panggalo	69,53	28	115	120
Ulumanda	105,61	28	115	138
Polenga	126,69	33	120	123
Jumlah total	456,00			

Sumber/ Source: Kantor Camat Ulumanda/ District Office of Ulumanda 2019

3. Pemerintahan

Desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala DesaKelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Lurah. Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat desa yang memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas Pegawai Negeri adalah pegawai yang telah mem nuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya.

Secara administratif Kecamatan Ulumanda terdiri dari 8 desa sedang jumlah Satuan Lingkungan Setempat (SLS) sebanyak 46 dusun Dalam menjalankan pemerintahannya kecamatan Ulumanda memiliki total 248 pegawai yang tersebar diberbagai instansi, jika dilihat dari jenis kelamin, pegawai perempuan nampak lebih dominan dibandingkan pegawai laki-laki, Jumlah pegawai laki- laki berjumlah 89 orang sedangkan pegawai perempuan berjumlah 169 pegawai perempuan berjumlah 169. Persentasi Jumlah Pegawai Pada Instansi/Jawatan Dinas Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Ulumanda, 2018 (Perempuan/Female 66% dan Laki-laki/Male 34%.

Tabel 3: Banyaknya Pegawai Pada Instansi/Jawatan Dinas Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Ulumanda, 2018

Jawatan / Dinas	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah Total
	Tetap	Tdk Tetap	Tetap	Tdk Tetap	
Kantor Camat	19	1	22	19	61
Cabang Dinas P&K	3	6	2	4	15
Puskesmas	6	18	24	62	110
Kantor Urusan Agama	8	11	3	10	32
PLN	1	-	5	-	6
BKKBN	3	3	6	6	18
Kelautan, Perikanan, Peternakan	2	-	22		2
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan	7	2	2	6	15
Kantor Pembantu Pos dan Giro	-	-	-	-	-
Statistik	-	-	-	-	-

Sumber/Source: Kantor Camat Ulumanda/ Subdistrict Office of Ulumanda 2019

Tabel 4: Kelembagaan Desa Menurut Desa/ Kelurahan di Kecamatan Ulumanda, 2018

Desa / Kelurahan	BPD	LKMD/LMD	Lembaga Adat
Sambabo	1	1	1
Salutambung	1	1	1
Kabiraan	1	1	1
Sulai	1	1	1
Tandeallo	1	1	1
Panggalo	1	1	1
Ulumanda	1	1	1
Polenga	1	1	1
Jumlah Total	8	8	8

Sumber/Source: Kantor Camat Ulumanda/ Subdistrict Office of Ulumanda 2019.

Tabel 5: Banyaknya Dusun/Lingkungan di Kecamatan Ulumanda 2018

Desa / Kelurahan	Lingkungan	Dusun
Sambabo	-	8
Salutambung	-	8
Kabiraan	-	8
Sulai	-	5
Tandeallo	-	4
Panggalo	-	4
Ulumanda	-	7
Polenga	-	7
Jumlah total		51

Sumber/Source: Kantor Camat Ulumanda/ Subdistrict Office of Ulumanda 2019

4. Penduduk

Penduduk Kecamatan Ulumanda adalah semua orang yang berdomisili di wilayah administratif Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan persentase pertambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu Kepadatan penduduk adalah rasio banyaknya penduduk per kilometer persegi.

Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan pada suatu wilayah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki untuk 100 penduduk perempuan Rumah tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus dan biasanya tinggal bersama serta pengelolaan makan dari satu dapur. Yang dimaksudkan dari satu dapur adalah jika pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola bersama-sama menjadi satu. Anggota rumah tangga adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, baik yang berada di rumah pada waktu pencacahan maupun yang sementara tidak ada Rata-rata anggota rumah tangga adalah rata-rata jumlah anggota rumah tangga per rumah tangga. Penduduk Kecamatan Ulumanda berdasarkan proyeksi, berikut diuraikan dalam tabel:

Tabel 6: Penduduk Menurut Desa/Kelurahan, Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin di Kecamatan Ulumanda, 2018

Desa / Kelurahan	Jenis Kelamin (Sex)			Rasio Jenis Kelamin
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
Sambabo	542	483	1 025	112,22
Salutambung	734	744	1 478	98,66
Kabiraan	700	639	1 339	109,55
Sulai	447	475	922	94,11
Tandeallo	677	696	1 373	97,27
Panggalo	529	497	1 026	106,44
Ulumanda	548	513	1 061	106,82
Polenga	505	501	1 006	100,80
Jumlah total	4 682	4 548	9 230	102,95

Sumber/Source: Kantor Camat Ulumanda / Subdistrict Office of Ulumanda 2019

Tabel 7: Kepadatan Penduduk dan Anggota Rumah Tangga Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Ulumanda, 2018

Desa/Kelurahan	Luas km²	Jumlah RT	Penduduk	Rata-Rata	
				Kepadatan penduduk	Anggota RT
Sambabo	20,88	215	1 025	49,09	4,77
Salutambung	36,26	312	1 478	40,76	4,74
Kabiraan	25,62	285	1 339	52,26	4,70
Sulai	12,52	197	922	73,64	4,68
Tandeallo	58,89	285	1 373	23,31	4,82
Panggalo	69,53	213	1 026	14,76	4,82
Ulumanda	105,61	247	1 061	10,05	4,30
Polenga	126,69	233	1 006	7,94	4,32
Jumlah total	456,00	1987	9 230	20,24	4,65

Sumber/Source: Kantor Camat Ulumanda/ Subdistrict Office of Ulumanda 2019

B. Pembahasan

1. Peran Kelembagaan UPT-DPPKB dalam mengendalikan penduduk di Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene.

"Saya sebagai peneliti melakukan wawancara kepada salah satu informan dari Kepala UPT-DPPKB Ulumanda, Bapak Syamsuddin Idris, S.IP, beliau mengatakan berikut kutipan wawancaranya bahwa:

"Bahwa dalam rangka penanggulangan kepadatan penduduk khususnya di kecamatan Ulumanda adalah dengan melakukan implementasi kebijakan pemerintah yang dicanangkan melalui program keluarga berencana melalui instansi pertikal yaitu BKKBN,untuk penekan angka penduduk agar tidak terus menerus bertambahjumlah penduduk maka pemerintah melakukan dengan dasar bahwa satu-satunya kontrasepsi yang aman dan dapat diandalkan untuk didistribusikan secara komersial ialah kondom, yang menempatkan kesuburan secara tegas dalam pengendalian pria. Semua metode yang diterapkan kepada wanita memerlukan setidak-tidaknya semacam bantuan atau pengawasan professional dari pihak yang berwenang.lebih lanjut disampaikan pula bahwa sebenarnya bukan berarti melarang penduduk desa melahirkan, tapi paling tidak menjaga jarak kelahiran agar ibu-ibu juga terkendali kesehatannya, apalagi kalau masyarakat idak berpenghasilan tetap atau termasuk orang miskin" (wawancara, tanggal 10 Mei 2020).

Ka.UPT-DPPKB Kecamatan Ulumanda bahwa beliau mengatakan dalam kutipan wawancara ini adalah sebagai berikut "...Bahwa sebenarnya kami sebagai Kasi Pemerintahan yang juga menangani perkembangan penduduk, dan setiap bulannya melakukan pelaporan tentang perkembangan penduduk di Kecamatan Ulumanda, sehingga kami juga sering melakukan rapat-rapat koordinasi dengan instansi yang terkait, di kecamatan Ulumanda ini termasuk adalah Kecamatan baru terbuka sehingga masyarakatnya masih dibilang mengandalkan kultur atau budaya yang ada, Ulumanda ini berada pada ketinggian, secara geografis penduduk ulumanda ini belum mendapatkan layanan yang maksimal diakibatkan sarana infrastruktur belum menyeluruh di pelosok kampung, nah sehingga kami bersama dengan petugas pelayanan KB, belum dilakukan secara maksimal dalam mensosialisasikan Gerakan Keluarga berencana.(wawancara tanggal 12 Mei 2020)

Bapak Abd. Rajab petugas Sub PPKBD menyebutkan "bahwa sebenarnya, kalau selama ini kami dari petugas PLKB selalu melakukan sosialisasi tentang bagaimana merubah pola pikir masyarakat yang ada di desa tentang pentingnya ber-KB bagi yang berumur dan telah mempunyai anak lebih dari pada 2-3 orang agar sekiranya menggunakan alat kontrasepsi yang disiapkan oleh pemerintah, agar dapat membatasi angka kelahiran anak, persoalannya bukan dilarang berbuat sebagai suami istri, tapi perlu batasan kelahiran, agar kedepannya tidak terlalu terbebani biaya hidup dalam kehidupan sehari harinya, hidup bisa lebih baik karena tanggungan tidak terlalu berat"(wawancara, tanggal 12 Mei 2020)

Perpres nomor 62 tahun 2010 tentang BKKBN yang sama yakni fungsi:

1) Koordinasi kegiatan di lingkungan BKKBN
2) Koordinasi dan penyusunan rencana dan program di lingkungan BKKBN;

3) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, arsip, dan dokumentasi di lingkungan BKKBN;
4) Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerjasama, dan hubungan masyarakat;
5) Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
6) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BKKBN

Berikut pernyataan dari Kepala UPT-DPPKB Kecamatan Ulumanda "....Bahwa kedepan strategis kelembagaan UPT-DPPKB dalam mengendalikan Penduduk di Kecamatan Ulumanda , tetap optimis dengan melakukan langkah-langka kongkrit, bagaiamana kebijakan pemerintah dapat diimlpementasikan, bagamana juga kerjsama antar instansi dan melibatkan seluruh stakeholders yang terkait dalam membatasi kepadatan penduduk, namun demikian diperlukan kerjasama anatara Pemerintah dengan masyarakat, kami mencoba menerapkan strategi dengan melakukan langka-langka pendekatan kekeluargaan, dengan demikian petugas PPKBD bisa diterima di hati masyarakat.(Wawancara, 12 Mei 2020)

Wawancara dengan Ibu Ida Nirmala dan bapak Abd.Razak "...,Kita mulai Dari Kampung KB, merupakan cikal bakal terbentuknya Pendidikan Masyarakat Desa, apabila pembangunan pada seluruh kampung maju, maka desa pun akan berkembang, apabila seluruh desa berkembang maka sudah barang tentu negara pun akan menjadi maju. Oleh karena itu cukup beralasan, apabila pembangunan masyarakat bisa dimulai dari wilayah-wilayah pinggiran, yaitu dari kampung-kampung yang tersebar di seluruh pedesaan. Melalui wadah kampung Keluraga Berencana (KB), diharapkan pelaksanaan program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga serta program pembangunan lainnya dapat berjalan secara terpadu dan bersamaan. (Wawancara, 16 Mei 2020)

Sasaran pengguna alat kontrasepsi dari Bidan desa dan petugas Puskesmas,serta adanya pembagian alat kontrasepsi secara gratis sehingga mempermudah para pengguna untuk mendapatkan alat kontrasepsi.

Upaya menekan laju pertumbuhan penduduk yang ada di Kecamatan Ulumanda bukanlah suatu hal yang mudah dimana kita dihadapkan pada beberapa sudut pandang kelompok masyarakat yang berbeda beda. untuk itulah UPT.DPPKB memerlukan mitra dilapangan demi pencapaian tujuan yang maksimal.

Menurut Mahardika (2012:89) menyatakan bahwa PLKB adalah pegawai pusat yang bertgas melaksanakan atau mengelola, menggerakkan, memberdayakan serta menggalang dan mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan program kependududukan bersama masyarakat. Adapun Peran PLKB di kec. Ulumanda dalam memperoleh data maupun informasi tentunya sangat diperlukan, sesuai dalam buku pegangan, untuk itulah beberapa langkah yang dilakukan dalam menekan laju pertumbuhan penduduk yang ada di Kecamatan Ulumanda di tempuh dengan berbagai cara antara lain :

a. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat di setiap desa tentang tujuan dalam ber Kb dan pengenalan alat kontrasepsi dan cara penggunaannya.
b. Bekerja sama dengan bidan desa dan petugas Puskesmas setempat dalam pengolahan data pengguna pengguna alat kontrasepsi serta pembagiannya.
c. Mengunjungi setiap posyandu,untuk mengajak dan menjelaskan kepada ibu-ibu tentang alat kontrasepsi dan pentingnya dalam menjaga jarak kelahiran.
d. Dengan adanya kader-kader atau SUB.BPKB yang ada di setiap desa,yang bertugas membantu para PLKB dalam pengolahan data.

Selain PLKB yang ditugaskan disetiap wilayah desa yang ada dikecamatan ulumanda, UPT DPPKB juga membentuk gugus tugas dimana gugus tugas yang dimaksud biasa tersebut dengan nama pokja. Pokja yang dibentuk berjumlah delapan orang ketua satu orang sekertaris dan seterusnya beranggotakan dalam jumlah yang tidak ditentukan (dikondisikan).

Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi, masing masing Pokja berperan secara subyektif dimana setiap kendala ataupun masaalah yang dihadapi oleh masyarakat akan dipaparkan pada setiap penyelenggaraan LOKMIN (Loka Karya Mini) di tingkat kecamatan.

Pada tahun 2019 ada beberapa kasus sekaitan dengan laju perkembangan penduduk yang mengalami tingkat kemajuan tidak seimbang, dan kasus ini merupakan hasil pengkajian data yang dilakukan oleh Pokja khususnya di desa sambabo. berikut adalah gambaran laju perkembangan penduduk di desa sambabo Tahun 2017 -2018 :

Tabel 8: Perkembangan Penduduk di Desa Sambabo Desember 2017

No.	Nama Dusun	(Bayi 0-12 Bulan)	(Balita 13-59 Bulan)	(Anak Usia 5-6 Tahun)	(Anak Usia SD 6-12 Tahun)	(Anak Usia SMP 13-15 Tahun)	Jumlah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.	Sambabo	2	4	2	21	10	39
2.	Sambabo Utara	1	3	9	13	13	39
3.	Sambabo Timur	2	5	4	20	15	45
4.	Sambabo Barat	1	4	2	15	6	28
5.	Rura	2	5	6	12	6	31
6.	Katumbangan	1	3	3	16	9	32
7.	Rica – Rica	2	4	4	22	13	45

8.	Limbong Siroma	1	1	4	11	7	24
Jumlah		12	29	34	130	69	265

Tabel 9: Perkembangan Penduduk di Desa Sambabo Desember 2018

No.	Nama Dusun	(Bayi 0-12 Bulan)	(Balita 13-59 Bulan)	(Anak Usia 5-6 Tahun)	(Anak Usia SD 6-12 Tahun)	(Anak Usia SMP 13-15 Tahun)	Jumlah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.	Sambabo	3	5	2	23	8	41
2.	Sambabo Utara	5	4	9	15	11	43
3.	Sambabo Timur	2	3	6	22	13	46
4.	Sambabo Barat	4	4	2	17	4	31
5.	Rura	4	5	6	14	4	31
6.	Katumbangan	3	4	3	18	7	35
7.	Rica – Rica	2	5	4	24	11	46
8.	Limbong Siroma	4	3	4	13	5	29
Jumlah		27	31	36	146	53	295

Keterangan diatas menunjukkan bahwa laju perkembangan penduduk di desa sambabo kecamatan ulumanda dalam kurun waktu satu tahun mencapai kurang lebih 11 %.

Berdasarkan dari sumber data yang ada, pada bulan Januari tahun 2018, UPT DPPKB dengan langkah serius melakukan inovasi guna untuk pencegahan laju perkembangan penduduk dengan menetapkan dan meresmikan dusun sambabo sebagai wilayah kampung KB. Hal ini dilakukan demi pendekatan pelayanan informasi dan komunikasi, akhirnya pada bulan Desember tahun 2019 kembali UPT DPPKB melaksanakan LOKMIN (Loka Karya Mini) dan hasil dari kegiatan ini menunjukkan dengan jelas bahwa perkembangan penduduk dari tahun ketahun bisa diminimalisir. berikut adalah gambaran laju perkembangan penduduk di desa sambabo Tahun 2019 :

Tabel 10: Perkembangan Penduduk di Desa Sambabo Desember 2019

No.	Nama Dusun	(Bayi 0-12 Bulan)	(Balita 13-59 Bulan)	(Anak Usia 5-6 Tahun)	(Anak Usia SD 6-12 Tahun)	(Anak Usia SMP 13-15 Tahun)	Jumlah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.	Sambabo	1	3	3	22	9	38
2.	Sambabo Utara	2	1	6	16	7	32
3.	Sambabo Timur						
4.	Sambabo Barat	1	2	2	15	5	25
5.	Rura	1	2	4	11	8	36
6.	Katumbangan	2	3	2	19	7	35
7.	Rica – Rica	3	2	3	24	8	39
8.	Limbong Siroma	1	2	2	10	6	21
Jumlah		13	18	27	137	64	259

Dari uraian diatas, laju perkembangan penduduk di desa sambabo kecamatan ulumanda dalam kurun waktu satu tahun mengalami penurunan kurang lebih 11,96 %.

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa peningkatan menulis teks berita oleh Siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Tapalang Barat Tahun Pelajaran 2019/2020 sebelum menggunakan teknik 3M berada pada kategori cukup. 2. Peningkatan menulis teks berita oleh Siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Tapalang Barat Tahun Pembelajaran 2019/2020 setelah menggunakan teknik 3M berada pada kategori baik. 3. Dari keseluruhan terlihat jelas bahwasannya teknik pembelajaran 3M memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan menulis teks berita oleh Siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Tapalang Barat Tahun Pelajaran 2019/2020. Hal itu terbukti dari nilai rata-rata sebelum mennggunakan teknik 3M 65,7 dan sesudah menggunakan teknik 3M mendapatkan nilai rata-rata 79,9. KKM yang diberikan sekolah adalah 7,5. Maka dari itu teknik 3M ini sangat berpengaruh untuk pencapaian KKM di sekolah Siswa kelas VIII SMPN Negeri 4 Tapalang Barat.

Berdasarkan penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan, peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut. Pertama Sekolah harus memberikan kesempatan kepada guru untuk mengembangkan Penerapan pembelajaran menggunakan teknik 3M dan menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang berkaitan dengan teknik pembelajaran tersebut dalam proses pembelajaran. Kedua Guru mempunyai peranan yang penting dalam kegaiatan pembelajaran. Penerapan pembelajaran menulis teks berita menggunakan teknik 3M ini dapat digunakan oleh guru untuk menyelenggarakan pembelajaran yang lebih menarik dan kreatif yang dapat menyenangkan dan mengaktifkan siswa.

DAFTAR PUSTAKA

BKKBN, (2007). Program Keluarga Berencana Nasional. Jakarta: BKKBN.

Farida. (2008). Membangun Desa Partisipatif. Makasar: Graha Ilmu.

Kriyantono, Rachmat. (2008). *Teknik Praktis Riset Komunikasi.* Jakarta: Kencana.

Mahardika, (2012). Buku Ilmu Kebidanan Sarwono Prawirohardjo. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka.

Mayasari, Y. (2017). *Faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja petugas lapangan keluarga berencana dalam pelayanan safari kb implant (studi pada petugas lapangan keluarga berencana (plkb) di dinas sosial kabupaten pati)* (doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Semarang).

Peraturan Presiden nomor 62 tahun 2010 tentang BKKBN Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Sugiyono, (2014). *Metode Penelitian Administrasi,* Bandung: Alfabeta

Thoha, M. (2002). Reformasi birokrasi pemerintah. In *Seminar Good Goverance di Bappenas*.

Zuhriyah, L. (2012). Revitalisasi peran petugas lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dalam meningkatkan peserta Keluarga Berencana (KB)(studi di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang). *Jurnal Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro*, *1*(2), 18698.